

DAFTAR PUSTAKA

- _____, 1994. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- _____, 2002. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/KMK.04/2002 Tentang Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- _____, 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
- _____, 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- _____, 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah.
- _____, 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 perubahan atas Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- _____, 2007. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketetapan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- _____, ADBTA7184-INODraft Pedoman Tata Cara Pemungutan PBB-P2
BPS, Kabupaten Ngawi dalam Angka (KNDA) 2013
- _____, Kabupaten Madiun dalam Angka 2013
- _____, Kabupaten Malang dalam Angka 2013
- _____, Kabupaten Pacitan dalam Angka 2013
- DJPk RI, *Kumpulan Peraturan Daerah Otonomi daerah*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- Ghofir, Abdul, 2000, Optimalisasi Pbb Dalam Penerapan Otonomi Daerah, Berita Pajak No. 1411/Tahun XXXII/15 Januari 2000

- Pokok-pokok Pengaturan Undang-undang No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, <http://www.syukriy.wordpress.com/2009/10/17/>
- Martono, Nanang, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: Rajawali Pers
- Liberty, Pandiangan, *Pajak Pusat dan Pajak Daerah dalam Kerangka Sistem Perpajakan nasional*, Jurnal Perpajakan Indonesia Vol I No. Pebruari 2002.
- Mardiasmo dan Makhfatih, 2002, "*Penghitungan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah*"
- _____, 2002, *Perpajakan, Edisi revisi*, penerbit Andi, Yogyakarta
- _____, 2009, *Perpajakan, Edisi revisi*, penerbit Andi, Yogyakarta.
- Marantika, Arya. 2012. Penilaian PBB. <http://marantika-arya.blogspot.com/2012/07/penilaian-pbb.html>. Diakses 3 Maret 2014.
- Musgrave, R. A, dan Musgrave, P.B. , 2008, *Public Finance in Theory and Practice*, McGraw-Hill, New York
- Nasira, lit Ida Hatin. 2010. Evaluasi Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Menghadapi engalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Menjadi Pajak Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Lumajang). Skripsi : Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Priandana, Hernanda Bagus, SH. 2009. Keberadaan Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Pajak Pusat dalam Era Otonomi Daerah. Tesis.
- Puspitasari, Purbaningrum. 2006. Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Resmi, Siti, 2005, *Perpajakan teori dan kasus*, Edisi Kedua, Salemba Empat, Jakarta
- Sari, Arumaisha K. 2011. Evaluasi Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Daerah (Studi kasus Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri). Skripsi : Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Soemitro Rochmat, Zainal, 2001. *Pajak bumi dan bangunan*. Cet.IV. Bandung. Refika Aditama.
- Sulistiyono. 2011. Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP). <http://sulistiyono39.blogspot.com/2011/10/sistem-manajemen-informasi-objek-pajak.html>. Diakses 23 Pebruari 2014.
- Supriyanto, Heru, 2008. *BPHTB, Sebuah Catatan*, Indonenesia Tax Review, Volume 1/Edisi17/2008
- _____, 2008. *Cara Menghitung PBB, BPHTB dan Bea Meterai*, Penerbit Index, Jakarta, 2008

- _____, 2008. *NPOPTKP, per-SSB atukah Kolektif?*, Indonesia Tax Review, Volume1/Edisi 06/2008
- _____, 2009. *BPHTB terhadap Konversi, Penegasan Hak dan Pengakuan Hak*, Indonesia Tax Review, Volume II/Edisi 08/2009
- _____, 2010. *Peluang dan Tantangan Pengalihan PBB P2 dan BPHTB*, Indonesia Tax Review, Volume III/Edisi 01/2010
- Suwarno, Agus dan Suhartiningsih, 2008. Efektifitas Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 7, Nomor 2, tahun 2008, Hlm 162-173
- Tjahjono, Achmad dan Husein, F, Muh. 2000. *Perpajakan*. Edisi Revisi, Cetakan I. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang *Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria*.
- Wahyudi, Eddi. 2012. Memahami Pengelolaan PBB P2 dan Menyiapkan Peraturan Pendukungnya. <http://eddiwahyudi.com/2012/07/19/memahami-pengelolaan-pbb-p2-dan-menyiapkan-peraturan-pendukungnya/>. Diakses 25 Pebruari 2014.
- Wahyudi, Eddi. 2012. SISMIOP: Sang Sistem Pengelola Administrasi Data PBB P2. <http://eddiwahyudi.com/2012/11/17/>. Diakses 25 Pebruari 2014.
- Wahyudi, Eddi. 2012. Studi Kasus Devolusi PBB P2: Peluang dan Tantangan Bagi Pemda Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumbarja. <http://eddiwahyudi.com/tag/pajak-bumi-dan-bangunan/>. Diakses 25 Pebruari 2014.
- Wahyuni, Dian, 2010, Persiapan Pemerintah menghadapi peralihan pajak bumi dan bangunan dari pajak Pusat menjadi pajak Daerah : (studi kasus Jabodetabek), Tesis Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik FEUI, tidak diterbitkan
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.

Peraturan terkait pelaksanaan PBB P2

- Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.
- Peraturan bersama menteri keuangan dan mendagri Nomor 213/ PMK.07/ 2010 dan Nomor 58 tahun 2011 tentang tahapan persiapan pengalihan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan sebagai pajak daerah.
- Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan PBB-P2 sebagai Pajak Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.03/2011 Tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2009 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2009 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2011 tentang Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembetulan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.03/2009 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Atau Surat Tagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Yang Tidak Benar.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-25/Pj/2009 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi Dan Bangunan.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 16/Pj/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 25/Pj/2009 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi Dan Bangunan.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-37/Pj/2008 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, Dan/ Atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu Dalam Peraturan Perundang-Undangan Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.

Perdirjen Pajak Nomor Per-02/Pj/2012 tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak Dan Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak Sebagaimana Diubah Dengan Perdirjen Pajak Nomor Per-02/Pj/2013 Dan Per-07/Pj/2013.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-533/Pj./2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan Dan Penilaian Objek Dan Subjek Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Dalam Rangka Pembentukan Dan Atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP).

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-115/Pj./2002 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-533/Pj./2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan Dan Penilaian Objek Dan Subjek Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Dalam Rangka Pembentukan Dan Atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP).

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 61/ PJ/ 2010 tentang tata cara persiapan pengalihan PBB P2 sebagai pajak daerah.

Kementerian keuangan Direktorat Jenderal Pajak, 2013, Pengalihan PBB Perdesaan & Perkotaan, Nomor: PJ.091/PL/B/001/2013-00, www.pajak.go.id